

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui beberapa proses dan salah satunya adalah dengan perencanaan pembangunan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan adalah pekerjaan yang sia-sia. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, diperlukan dasar pijakan dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu juga perlu diawasi dan dievaluasi hasil-hasilnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam data statistik untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu, masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengawal pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan ekonomi daerah tersebut. Indikator ekonomi tersebut adalah

pendapatan regional perkapita yang biasanya digunakan sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

PDRB perkapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini antara lain dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi disuatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Dasar pendekatan untuk menghitung pendapatan regional perkapita Kota Bandarlampung menggunakan PDRB harga konstan tahun 2000.

Selain itu, tingkat pendapatan yang diterima masyarakat mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tingkat pajak, karena penerimaan pajak sangat tergantung pada pendapatan masyarakat. Dengan demikian maka apabila pendapatan yang diterima masyarakat naik maka akan meningkatkan pajak daerah.

Tabel 1. Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Bandarlampung (rupiah)

Tahun	Pendapatan Regional Perkapita	Pertumbuhan %
2003	4.648.321	-
2004	4.954.928	6,60
2005	5.138.409	3,70
2006	5.511.572	7,26
2007	5.835.249	5,87

2008	6.128.093	5,02
------	-----------	------

Sumber: Badan Pusat statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Dari tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Regional Perkapita Kota Bandar Lampung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yakni dari pendapatan regional perkapita pada tahun 2003 sebesar Rp 4.648.321, pada tahun 2004 sebesar Rp 4.954.928, Rp 5.138.409 pada tahun 2005, Rp 5.511.572 pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 sebesar Rp 5.835.249 dan meningkat pada tahun 2008 sebesar Rp 6.128.093 atau sebesar 5,02 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Sehingga indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, dan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah, dimana PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor atau sub sektor yang ikut membentuk nilai tambah sektor perekonomian suatu daerah. Kesanggupan mencapai pertumbuhan tersebut juga merupakan refleksi dari kondisi ekonomi pada periode yang bersangkutan.

Pendapatan Regional dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional, khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai indikator mengukur tingkat kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk melihat perekonomian secara riil dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandarlampung atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2008 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian, peternakan dan perikanan	201.158	210.140	210.340	231.358	238.175	247.577
2	Pertambangan dan penggalian	75.471	80.686	77.288	75.905	74.714	72.574
3	Industri pengolahan non migas	706.670	746.367	798.200	918.547	1.014.690	1.064.500
4	Listrik dan air bersih	39.925	40.631	41.214	35.319	37.918	39.050
5	Bangunan	379.389	387.569	392.272	396.438	419.001	445.025
6	Perdagangan, hotel dan restoran	908.636	948.289	968.952	972.055	999.763	1.037.250
7	Pengangkutan dan komunikasi	674.531	738.202	790.381	821.273	849.185	890.121

8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	480.475	634.984	725.941	842.867	997.415	1.159.261
9	Jasa-jasa	758.586	762.595	773.600	785.284	795.292	840.638
Total PDRB Tanpa Migas		4.224.841	4.549.463	4.778.188	5.079.046	5.426.153	5.795.996

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandarlampung

Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per tahunnya adalah sebesar 5,44 persen. Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk disuatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuannya menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Adapun sektor-sektor yang mendukung laju pertumbuhan PDRB adalah sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan non migas, sector listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandarlampung atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2008 (persen)

No.	Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian, peternakan dan perikanan	-	4,47	0,10	9,99	2,95	3,95
2	Pertambangan dan penggalian	-	6,91	-4,21	-1,79	-1,57	-2,86
3	Industri pengolahan non migas	-	5,62	6,94	15,08	10,47	4,91
4	Listrik dan air bersih	-	1,77	1,43	-14,30	7,36	2,99
5	Bangunan	-	2,16	1,21	1,06	5,69	6,21

6	Perdagangan, hotel dan restoran	-	4,36	2,18	0,32	2,85	3,75
7	Pengangkutan dan komunikasi	-	9,44	7,07	3,91	3,40	4,82
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	-	32,16	14,32	16,11	18,34	16,23
9	Jasa-jasa	-	0,53	1,44	1,51	1,27	5,70
Total PDRB Tanpa Migas		-	7,68	5,03	6,30	6,83	6,82

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandarlampung (diolah)

Pada sektor pertanian laju pertumbuhan pada tahun 2007-2008 sebesar 3,95 persen, namun pada sektor pertanian Kota Bandarlampung yang paling berperan adalah perikanan.

Sebagaimana diketahui Kota Bandarlampung adalah sentra perikanan laut di Provinsi Lampung. Bandarlampung mempunyai tempat pelelangan ikan yang besar sehingga sumber daya ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

Sektor pertambangan dan penggalan, seperti halnya sektor pertanian, peternakan dan perikanan, kontribusinya terhadap perekonomian Bandarlampung sangat kecil, bahkan paling kecil dibandingkan sektor-sektor yang lain. Dilihat dari trend laju pertumbuhan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, sektor ini mengalami penurunan. Pada tahun 2006 pertumbuhannya mencapai -1,79 persen, tahun 2007 pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -1,57 persen, sedangkan untuk tahun 2008 sebesar -2,86 persen, atau memberi sumbangan PDRB sebesar 72.574 juta rupiah.

Kota Bandarlampung sebagai pusat perekonomian di Provinsi Lampung, pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dalam kurun waktu lima tahun ini terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan sektor industri ini meliputi industri besar, sedang, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Di Kota Bandarlampung terdapat banyak industri yang mengolah hasil bumi yang berasal dari wilayah lain, misalnya industri pengolahan tapiyoka, minyak sawit dan lainnya. Disamping itu banyak industri yang dilakukan rumah tangga yang berskala kecil, baik dilihat dari omset maupun penyerapan tenaga kerjanya. Laju perkembangan sektor ini mencapai 4,91 persen di tahun 2008.

Listrik dan air bersih merupakan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Perusahaan listrik dan air bersih dikuasai oleh pemerintah, karena penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan sektor ini adalah sebesar 2,98 persen. Dan memberi sumbangan sebesar Rp 39.050 juta.

Pada sektor bangunan di tahun 2008 mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 6,21 persen. Peran sektor bangunan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung dalam empat tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil meskipun tidak terlalu besar bila dibandingkan sektor lainnya. Sumbangan yang dihasilkan oleh sektor ini pada tahun 2008 sebesar Rp 445.025 juta.

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sumbangan sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung sangat stabil, bahkan secara agregat sektor ini merupakan salah satu leading sektor. Posisi geografis kota Bandar Lampung, yang merupakan pintu masuk Pulau Sumatera menjadikan sektor ini sangat menjanjikan. Secara kasat mata, Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi menjadi barometer usaha perdagangan, yang ditandai dengan kemunculan pasar baru baik tradisional maupun modern. Perkembangan warung makan baik tradisional maupun siap saji juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor ini. Bertambah banyaknya pengguna jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung juga menyumbang meningkatnya sektor ini. Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 3,75 persen pada tahun 2008.

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi yang menggembirakan terhadap perekonomian kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,82 persen pada tahun 2008. Dengan makin majunya kehidupan yang dialami masyarakat kota Bandar Lampung, menimbulkan arus pengangkutan

dan komunikasi meningkat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena fleksibilitas masyarakat haruslah ditopang dengan ketersediaan sarana penunjangnya. Bergesernya pola kehidupan dari agraris menuju industrialis, menimbulkan dampak yang positif terhadap sektor ini. Demikian pula dalam hal komunikasi, dimana masyarakat Kota Bandarlampung dewasa ini menuntut layanan yang prima dalam hal berkomunikasi terlihat pada laju pertumbuhan subsektor ini pada empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan.

Ada hal yang menarik tentang pertumbuhan perekonomian kota Bandarlampung yang terjadi pada sektor lembaga keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Semakin maraknya perekonomian yang diwarnai dengan kemunculan beberapa bank diluar kota Bandarlampung, menimbulkan dampak lembaga keuangan bukan bank banyak bermunculan di wilayah Bandarlampung. Sebagai pusat pemerintahan serta pusat kegiatan ekonomi, kota Bandarlampung menjadi pusat kota yang banyak dituju oleh masyarakat diluar Bandarlampung. Laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 16,23 persen pada tahun 2008

Sebagai pusat pemerintahan, sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kota Bandarlampung dan pertumbuhan sektor ini banyak dipengaruhi oleh subsektor swasta yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada tahun 2008. Penduduk yang semakin bertambah senantiasa membutuhkan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jasa sosial kemasyarakatan menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang diminati. Kebutuhan akan hiburan dan rekreasi di Bandarlampung juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan subsektor ini. Begitu juga dengan jasa perorangan dan rumah tangga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Subsektor pemerintahan umum juga mengalami peningkatan, hal ini sangat dimaklumi mengingat posisi

Kota Bandarlampung yang dekat dengan pemerintahan provinsi, sehingga indikator kebijakan publik banyak yang berpijak pada kebijakan pemerintah kota Bandarlampung.

Pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi non-migas sangat diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan devisa negara yang tentunya diarahkan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pengembangan atau pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat serta terjadinya integrasi sosial.

Pengembangan pariwisata di Indonesia bukan hanya sekedar untuk meningkatkan perolehan devisa saja, tetapi pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*). Pariwisata, bila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Secara makro, pariwisata sebagai suatu industri dapat meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, penambahan penerimaan pajak, retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional dan sekaligus akan memperkuat posisi Neraca Pembayaran. Pariwisata yang bersifat multidimensi (multi aspek dan aktivitas) tersebut serta dinamis menggambarkan konstelasi pengembangan pariwisata saat ini dan masa datang yang harus dihadapi dan dipertimbangkan dalam penetapan tujuan pengembangan pariwisata di suatu daerah.

Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam), serta industri lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata akan berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi Provinsi Lampung khususnya Kota Bandarlampung, hal ini disebabkan pariwisata merupakan salah satu primadona dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena Provinsi Lampung sangat kaya akan potensi obyek wisata alam. Selain itu Provinsi Lampung juga telah ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ke-18, sedangkan Kota Bandar Lampung sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh dalam bidang kepariwisataan, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana guna mencapai obyek wisata tersebut. Disamping itu, Kota Bandarlampung juga mempunyai potensi wisata yang sangat baik dan didukung topografi tinggi berbukit dan dataran rendah dekat dengan pantai, oleh karenanya memungkinkan untuk dikembangkan.

Dampak ekonomi pariwisata ini bahkan melintas kedalam bentuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi. Besarnya peran pariwisata dalam perekonomian tidak diragukan. Dampak pariwisata terhadap perekonomian akan semakin bertambah besar dengan adanya investasi yang dilakukan dunia usaha dan pemerintah. Maka pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Penggalan sumber-sumber penerimaan daerah penting halnya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, hal ini penting mengingat kebutuhan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan yang semakin lama semakin meningkat, dalam hal ini pemerintah kota Bandarlampung berupaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan PAD. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut

pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Dahlia : 2000).

Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN. Adapun elemen-elemen penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Unsur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Lainnya yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan andalan PAD. Peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama di samping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandarlampung tahun 2003-2008 (Juta rupiah)

Tahun	Pajak daerah	Retribusi daerah	PAD	Pertumbuhan %
2003	22,406,753	10,292,418	35,511,798	-
2004	22,304,069	10,498,677	36,689,576	3.32
2005	27,251,900	14,658,338	46,513,716	26.78
2006	26,975,594	11,088,122	46,137,259	-0.81
2007	30,411,162	12,533,405	53,714,914	16.42
2008	38,943,620	20,867,823	67,661,519	25.96

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandarlampung (diolah)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipungut dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi sektor pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi sektor pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Adapun pajak dari sektor pariwisata terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Kota Bandarlampung tahun 2003-2008 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Hotel	%	Pajak Restoran	%	Pajak Hiburan	%	Pajak Reklame	%
2003	2.822.523.175,00	-	2.525.343.666,00	-	651.855.000,00	-	1.363.328.892,00	-
2004	2.903.126.934,00	2,86	2.822.916.515,00	11,78	805.889.152,00	23,63	1.643.743.358,00	20,57
2005	3.486.255.200,00	20,09	3.346.527.082,00	18,55	1.087.445.300,00	34,94	2.006.875.011,00	22,09
2006	3.703.404.302,00	6,23	3.665.969.390,00	9,55	1.092.000.650,00	0,42	2.059.808.218,00	2,64
2007	4.157.117.559,00	12,25	4.576.424.522,00	24,84	1.486.131.507,00	36,09	2.425.847.135,00	17,77
2008	4.818.205.223,00	15,90	5.602.691.170,00	22,43	1.678.220.739,00	12,93	2.927.798.390,00	20,69
Rata-rata		8,19		12,45		15,43		11,97

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandarlampung

Pada tabel 5 dapat dilihat pada tahun 2008 pertumbuhan pendapatan dari pajak sektor pariwisata semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan pajak hotel yang meningkat sebesar 15,90 persen, pajak restoran sebesar 22,43 persen, pajak hiburan sebesar 12,93, dan pajak peklame sebesar 20,69 persen.

Seluruh pajak tersebut memiliki besaran tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda).

Tabel 6. Persentase Tarif Pajak Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandarlampung

Jenis Pajak	Peraturan Daerah	Tarif (%)
Pajak Hotel	Perda No 07 tahun 2002 Pasal 5	10
Pajak Restoran	Perda No 08 Tahun 2002 Pasal 5	10
Pajak Reklame	Perda No 03 Tahun 1999 Pasal 6	20
Pajak Hiburan	Perda No 10 Tahun 2002 Pasal 5	20

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandarlampung

Pada tabel 6 tarif pajak hotel yang ditetapkan pemerintah daerah kota Bandarlampung berdasarkan perda No 07 tahun 2002 Pasal 5 sebesar 10 persen. Pajak Restoran yang ditetapkan pemerintah daerah kota Bandarlampung berdasarkan perda No 08 tahun 2002 Pasal 5 sebesar 10 persen. Pajak Reklame yang ditetapkan pemerintah daerah kota Bandarlampung berdasarkan perda No 03 tahun 1999 Pasal 6 sebesar 20 persen. Pajak Hiburan yang ditetapkan pemerintah daerah kota Bandarlampung berdasarkan perda No 10 tahun 2002 Pasal 5 sebesar 20 persen.

Selain pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah.

Retribusi yang berasal dari sektor pariwisata adalah retribusi jasa usaha yaitu izan usaha objek wisata dan tempat wisata. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Kota Bandarlampung tahun 2003-2008 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Retribusi Jasa Usaha	Pertumbuhan (%)
2003	-	-	-
2004	40.000.100,00	20.650.000,00	-
2005	44.650.000,00	34.665.000,00	67,87
2006	49.650.000,00	35.125.000,00	1,33
2007	62.850.000,00	34.235.000,00	-2,53
2008	49.650.000,00	32.612.500,00	-4,74
Rata-rata			12,38

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandarlampung (diolah)

Pada tabel 7 dapat dilihat laju pertumbuhan penerimaan retribusi sektor pariwisata pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar -4.74 persen, dari tahun sebelumnya yang telah mengalami penurunan sebesar -2.53 persen.

Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya.

Tabel 8. Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata Kota Bandarlampung (rupiah)

No	Jenis izin usaha	Peraturan Daerah	Izin Baru	Daftar Ulang
1	Objek Wisata	Peraturan Daerah Kota Bandarlampung No 09 Tahun 2003 pasal 14	500,000	100,000
2	Taman Rekreasi		500,000	100,000

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandarlampung

Maka dengan dukungan penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang memadai, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata diharapkan dapat lebih optimal. Untuk menentukan besaran tarif pajak dan retribusi ini maka perlu dilihat pula perkembangan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhinya.

Tabel 9. Tingkat Inflasi Kota Bandarlampung tahun 2002-2008

Tahun	Inflasi (%)
2002	10.32
2003	5.44
2004	5.22
2005	21.17
2006	6.03
2007	6.58
2008	14.82

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 9 dapat dilihat tingkat inflasi Kota Bandarlampung. Dimana inflasi Kota Bandarlampung dari tahun 2006 sampai tahun 2008 semakin meningkat sehingga tingkat inflasi ini akan mempengaruhi besaran tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dari tahun 2006 sampai 2008 tingkat inflasi semakin meningkat, maka kelayakan tarif retribusi dan tarif pajak pun dievaluasi untuk mengetahui berapa besar tarif pajak yang seharusnya.

Dengan demikian, pada perekonomian Kota Bandarlampung yang semakin meningkat berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Kota Bandarlampung pun terus meningkat, dan kegiatan ini tentunya memerlukan fasilitas-fasilitas umum atau barang publik. Begitupun

pada sektor pariwisata, tentunya sarana dan prasarana yang terdapat pada sektor pariwisata memerlukan perawatan dan retribusi merupakan salah satu sumber biaya untuk perawatan prasarana tersebut. Sehingga perlu diberlakukan tarif pajak dan retribusi baru yang sesuai dengan kondisi perekonomian Kota Bandarlampung saat ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka pada perkembangan perekonomian Kota Bandarlampung yang semakin meningkat, apakah masih layak besaran tarif retribusi dan pajak sektor pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah besaran tarif retribusi dan pajak sektor pariwisata yang ditetapkan pemerintah Kota Bandarlampung saat ini masih layak atau tidak.

D. Kerangka Pemikiran

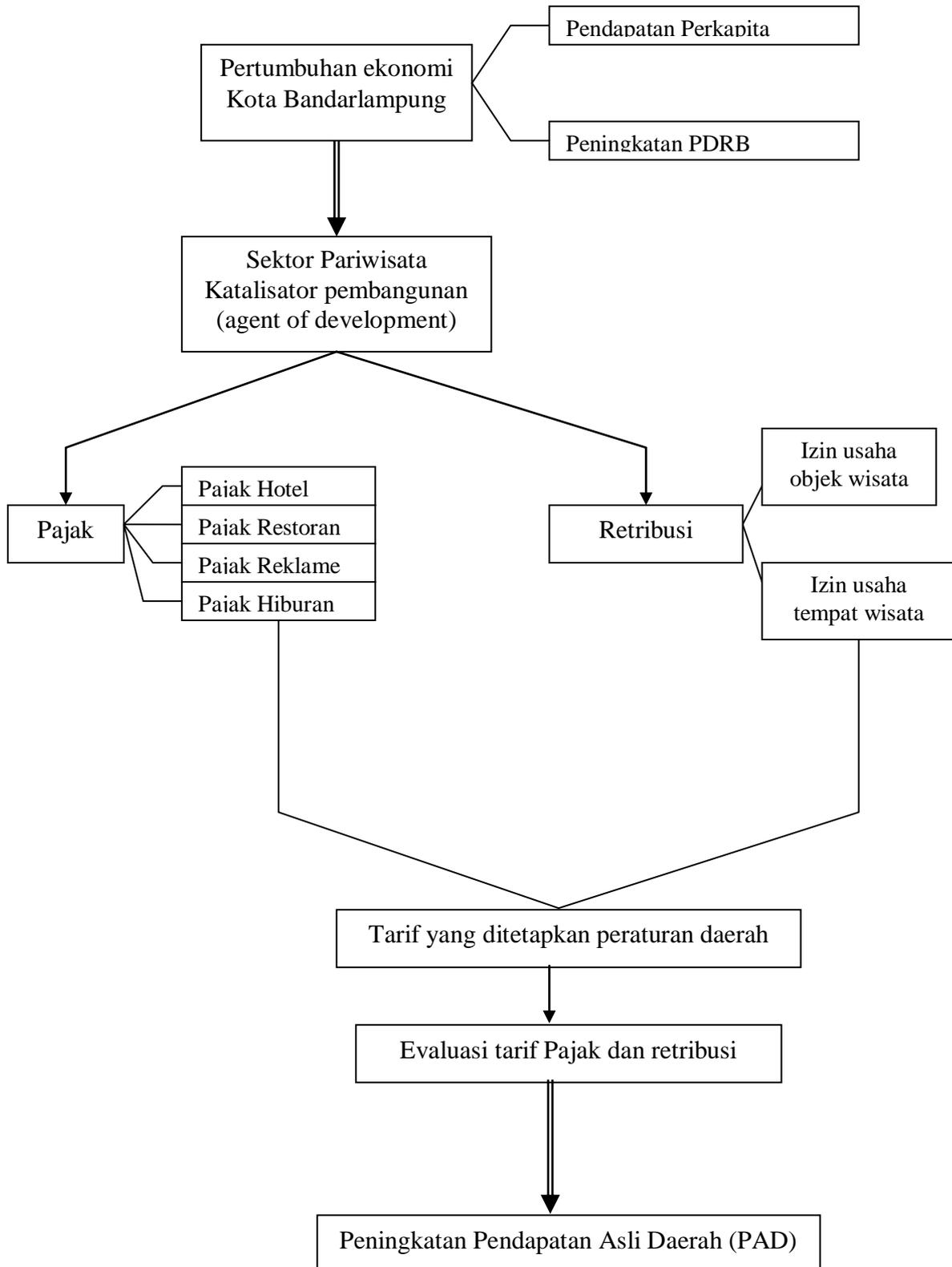
Pembangunan daerah yang didukung oleh potensi daerah dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, diharapkan daerah tersebut dapat membiayai sendiri pembangunan di daerahnya dengan potensi yang ada. Suatu daerah dikatakan berhasil melaksanakan kebijakan sebagai daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerah, salah satunya melalui pengelolaan retribusi dan pajak daerah.

Yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi Kota Bandarlampung adalah meningkatnya Pendapatan perkapita, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta pola konsumsi masyarakatnya.

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi ialah sektor pariwisata yang merupakan katalisator pembangunan (agent of development). Dalam menuju kemandirian daerah, potensi pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Penerimaan dari sektor pariwisata ini berupa pajak dan retribusi. Pajak pada sektor pariwisata ini bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan. Masing-masing pajak dan retribusi pada sektor pariwisata memiliki besaran tarif yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah.

Karena pertumbuhan ekonomi Kota Bandarlampung saat ini semakin meningkat maka perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran tarif retribusi dan pajak pada sektor pariwisata, hal ini dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagan Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga pada perkembangan perekonomian Kota Bandarlampung yang semakin meningkat, besaran tarif retribusi dan pajak subsektor pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah diduga sudah tidak layak sehingga perlu dilakukan evaluasi.